

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT SUKU BANTEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR (Dinamika Politik di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan)

Nazira Aulia Az-Zahra

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

E-Mail: naziraazzahra33@gmail.com

ABSTRACT

The gubernatorial election is a form of public political participation in a democratic system. This study aims to analyze the factors influencing voter behavior in the Banten gubernatorial election using structural, sociological, ecological, psychological, and rational approaches. This research employs a qualitative method with in-depth interviews conducted with voters in rural and urban areas to understand their preference patterns. The findings reveal that in rural areas, voters tend to be influenced by structural and ecological factors, such as social proximity, economic background, and familiarity with local figures. Meanwhile, in urban areas, psychological and rational factors play a more dominant role, where voters consider candidate image, campaign strategies, and track records. Additionally, the study found that voter abstention rates are higher in urban areas due to weaker social ties and greater political skepticism. This study concludes that voter behavior cannot be understood through a single approach but rather as an interaction of multiple factors that differ between rural and urban areas. Therefore, political campaign strategies should consider the demographic and social characteristics of each region to be more effective in increasing voter participation.

Keywords: Voter behavior, structural approach, psychological approach, gubernatorial election

ABSTRAK

Pemilihan gubernur merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Gubernur Banten dengan pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis, dan rasional. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pemilih di wilayah pedesaan dan perkotaan untuk memahami pola preferensi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pedesaan, pemilih cenderung dipengaruhi oleh faktor struktural dan ekologis, seperti kedekatan sosial, latar belakang ekonomi, serta figur yang dikenal secara lokal. Sementara itu, di perkotaan, faktor psikologis dan rasional lebih dominan, di mana pemilih lebih mempertimbangkan citra kandidat, strategi kampanye, dan rekam jejak. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat golput lebih tinggi di perkotaan akibat rendahnya keterikatan sosial dan tingginya skeptisme terhadap politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan

perilaku pemilih tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai faktor yang berbeda antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, strategi kampanye politik harus mempertimbangkan karakteristik demografi dan sosial masing-masing wilayah agar lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Kata Kunci: *Perilaku pemilih, pendekatan struktural, pendekatan psikologis, pemilihan gubernur*

PENDAHULUAN

Perilaku politik merupakan manifestasi dari hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi, mencerminkan interaksi antara individu, negara, dan kebijakan publik. Dalam konteks pemilihan gubernur di Banten tahun 2024, perilaku politik masyarakat menjadi indikator penting dalam memahami dinamika demokrasi di tingkat lokal (Sumendap et al., 2022; Suprianto & Rozi, 2024).

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan preferensi politik yang beragam, tetapi juga mencerminkan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi keputusan pemilih. Perbedaan geografis antara wilayah pedesaan dan perkotaan di Banten berpotensi membentuk pola perilaku politik yang kontras, mengingat karakteristik sosial masyarakat yang berbeda di kedua wilayah tersebut (Rahmat & Esther, 2016).

Perilaku politik pada dasarnya mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun keterlibatan dalam proses kebijakan (Sumendap et al., 2022). Dalam konteks

pemilu, perilaku politik tidak hanya terbatas pada penggunaan hak suara, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam mendukung kandidat, mengikuti diskusi politik, hingga berkontribusi dalam pembentukan opini publik (Sholikhah, 2016).

Namun, dinamika perilaku politik ini tidak bersifat homogen, terutama jika dibandingkan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan di Banten. Perbedaan akses informasi, tingkat pendidikan, serta struktur sosial dapat memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat di kedua wilayah tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan preferensi politik dalam pemilihan gubernur (Vivi friskilia et al., 2024)

Perilaku pemilih dalam pemilihan gubernur Banten tahun 2024 menjadi aspek krusial dalam memahami dinamika politik di wilayah ini, terutama bagi masyarakat suku Banten yang tersebar di berbagai daerah. Banten terdiri dari empat kabupaten (Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang) serta empat kota (Cilegon, Serang, Tangerang, dan Tangerang Selatan), yang masing-masing memiliki

karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Perbedaan ini berpotensi memengaruhi perilaku pemilih, terutama dalam membandingkan wilayah pedesaan seperti Pandeglang dan Lebak dengan wilayah perkotaan seperti Kota Serang dan Tangerang Selatan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi politik (Yulianti et al., 2024), serta dominasi nilai-nilai tradisional di pedesaan dan modernisasi di perkotaan dapat membentuk preferensi politik yang berbeda dalam pemilihan gubernur (Sumendap et al., 2022).

Perilaku pemilih masyarakat Banten memiliki peran krusial dalam menentukan hasil pemilihan gubernur, terutama melalui partisipasi aktif dalam memberikan suara (Sari & Diana, 2024). Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pemilu mencerminkan seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan (Hafidzul & Sunarso, 2024; Suprianto & Rozi, 2024).

Upaya memenangkan suara, partai politik dan kandidat kerap menawarkan berbagai janji politik serta strategi kampanye yang menargetkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di setiap daerah (Sari & Diana, 2024). Namun, pendekatan yang digunakan sering kali berbeda antara pedesaan dan perkotaan, mengingat perbedaan akses informasi, tingkat ekonomi, serta

preferensi politik masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Dalam pemilihan gubernur Banten, masyarakat sebagai target pengambilan suara dapat dikategorikan ke dalam empat jenis pemilih potensial (Sholikhah, 2016; Sumendap et al., 2022). Pertama, pemilih ideologis (*ideologist voters*), yaitu mereka yang menentukan pilihannya berdasarkan kesesuaian ideologi dan prinsip politik tertentu. Kelompok ini umumnya memiliki loyalitas tinggi terhadap partai atau kandidat yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai yang mereka anut.

Kedua, pemilih tradisional (*traditional voters*), yakni pemilih yang cenderung memilih berdasarkan faktor turun-temurun atau kedekatan budaya, seperti afiliasi dengan tokoh agama atau kelompok etnis tertentu (Hafidzul & Sunarso, 2024; Iqbal, n.d.).

Ketiga, pemilih rasional (*rational voters*), yaitu mereka yang mempertimbangkan visi, misi, serta program kerja kandidat sebelum menentukan pilihan. Pemilih ini lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan yang memiliki akses luas terhadap informasi politik (Naibaho et al., 2024).

Keempat, pemilih mengambang (*swing voters*), yaitu mereka yang belum memiliki pilihan tetap dan cenderung berubah-ubah, sering kali didominasi oleh pemilih pemula (Rahmat & Esther, 2016). Keberagaman tipe pemilih ini mencerminkan dinamika politik di Banten yang

kompleks, di mana masyarakat pedesaan dan perkotaan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menentukan preferensi politiknya (Rahmat & Esther, 2016; Sholikhah, 2016)

Salah satu permasalahan utama dalam pemilihan gubernur Banten 2024 adalah praktik klientelisme yang berkaitan erat dengan patronase politik. Dalam buku *Democracy for Sale* (Aspinall & Berenschot, 2017) klientelisme diartikan sebagai strategi pertukaran untuk mendapatkan suara, sedangkan patronase merujuk pada bentuk manfaat yang diberikan dalam pertukaran tersebut.

Praktik ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses demokrasi karena hampir semua pasangan calon di daerah pemilihan terlibat dalam pola hubungan timbal balik ini (Sholikhah, 2016). Di wilayah pedesaan, patronase sering kali berbentuk bantuan sosial, proyek pembangunan, atau dukungan finansial kepada tokoh masyarakat.

Sementara itu, di perkotaan, strategi klientelisme lebih cenderung menggunakan akses jaringan, pemberian insentif ekonomi, atau janji kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Akibatnya, dinamika politik di Banten tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi pemilih, tetapi juga oleh pola interaksi yang dibangun antara kandidat dan masyarakat melalui praktik klientelisme ini.

Seiring dengan berkembangnya sistem pemilu di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum juga mengalami peningkatan (Sari & Diana, 2024; Vivi friskilia et al., 2024). Partisipasi politik ini tidak hanya mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, tetapi juga memengaruhi preferensi politik yang mereka pilih.

Faktor latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pemilih menjadi aspek penting yang perlu dianalisis melalui berbagai pendekatan (Hafidzul & Sunarso, 2024). Dalam konteks ini, penelitian ini akan berfokus pada perbandingan perilaku politik masyarakat di wilayah pedesaan, seperti Pandeglang dan Lebak, dengan masyarakat di wilayah perkotaan, seperti Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, yang memiliki karakteristik demografis lebih pluralis. Perbedaan akses informasi, tingkat pendidikan, serta pola interaksi sosial di kedua wilayah tersebut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap variasi preferensi politik dalam pemilihan gubernur Banten 2024.

KAJIAN PUSTAKA

Perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah keputusan politik. Misalnya, interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, atau antar lembaga pemerintah, dan interaksi antara individu dan kelompok

dalam lingkup masyarakat. Hal ini memiliki tujuan, yaitu dalam rangka pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik, sehingga semua kegiatan ini merupakan perilaku politik.

Berbicara dalam ranah pemilihan umum, perilaku politik juga sangat diperlukan. Sebab, dalam pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara termasuk Indonesia, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat untuk dapat menentukan sikap dan pilihan dalam pemilihan umum atau pemilihan gubernur. Karena, hal tersebut sejalan dengan teori perilaku politik dalam penelitian ini. Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (1999), perilaku politik terbagi dalam 2, yaitu sejalan dengan definisi politik dan sistem kekuasaan.

Perilaku politik dapat didefinisikan sebagai tindakan atau partisipasi masyarakat dalam proses politik yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam konteks sistem kekuasaan, perilaku politik berperan dalam membentuk otoritas yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Melalui perilaku politik, masyarakat tidak hanya mengekspresikan preferensi dan aspirasinya, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan publik. Dennis Kavanagh, dalam teori yang dibangun mengenai perilaku politik

menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dianalisis ketika berbicara mengenai perilaku politik pemilih dengan menggunakan 5 pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan struktural. Pemilih ini berasal dari kelompok sosial yang sama dengan pasangan calon sehingga kecenderungan pemilih telah mengetahui latar belakang sosial dan ekonomi karena berada dalam lingkup yang sama.

Kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini berkaitan dengan faktor etnis kedaerahan. Sehingga pemilih memilih pasangan calon didasarkan dengan wilayah yang sama atau adanya pengaruh pendidikan dan jenis pendidikan atau bahkan pemilih memilih pasangan calon didasarkan dengan jenis kelamin dan usia.

Ketiga, pendekatan ekologis. Pendekatan ini melihat dengan faktor lingkungan atau tempat tinggal yang sama dengan pasangan calon. Bisa juga karena kondisi geografis memengaruhi perilaku pemilih. Misalnya pasangan calon lahir dan besar di suatu daerah pemilihan sehingga tetangga atau orang yang memiliki kesamaan tempat tinggal memilih pasangan calon tersebut.

Keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini memiliki beberapa faktor pendorong yang menentukan masyarakat memilih pasangan calon. Faktor pendorong berupa identifikasi partai pendukung pasangan calon.

Kelima, pendekatan rasional. Pendekatan ini didasarkan pada

kekuatan visi dan misi pasangan calon dalam berkampanye dan masyarakat melihat program kerja yang akan dilahirkan oleh paslon tersebut sehingga akan memengaruhi suara masyarakat.

Studi "Perilaku Politik Masyarakat Desa Tumaluntung Kab Minahasa pada Pemilihan Kepala Daerah 2020" menyoroti pengaruh faktor sosiologis, seperti ikatan keluarga dan kedekatan regional, dalam menentukan pilihan politik masyarakat desa. Sementara itu, penelitian "Perilaku Politik Masyarakat Suku Jawa dalam Pemilihan Kepala Desa Sumatera Utara" menekankan pengaruh tradisi budaya, kondisi ekonomi, dan jaringan sosial terhadap preferensi politik masyarakat suku Jawa. Adapun studi "Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kab Serang" mengidentifikasi pengaruh lingkungan keluarga dan sosial terhadap pemilih pemula yang sering kali masih memiliki pemahaman politik terbatas.

Persamaan ketiga penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih.

Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian pertama dan kedua berfokus pada masyarakat desa dengan aspek sosiologis dan budaya yang kuat, sedangkan penelitian ketiga menyoroti pemilih pemula dalam konteks pemilihan lokal. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi

ini akan menganalisis perbandingan perilaku politik masyarakat suku Banten di pedesaan dan perkotaan dalam pemilihan gubernur, dengan pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis, dan rasional untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perbedaan preferensi politik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi konteks sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi preferensi politik secara komprehensif.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yakni di Kabupaten Pandeglang sebagai representasi pedesaan, serta Kota Tangerang Selatan sebagai representasi perkotaan. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang kontras antara wilayah-wilayah tersebut, yang diasumsikan berpengaruh terhadap perilaku pemilih.

Informan dipilih melalui teknik purposive sampling (Creswell, 2016), dengan kriteria meliputi usia 23 dan 25 tahun, berdomisili di wilayah penelitian, serta memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam pemilihan gubernur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan dari masing-masing wilayah untuk mengidentifikasi pola preferensi politik berdasarkan lima pendekatan teori perilaku pemilih: struktural, sosiologis, ekologis, psikologis, dan rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Struktural

Pemilih dalam kelompok sosial yang sama dengan pasangan calon cenderung memiliki kedekatan emosional dan pemahaman yang lebih dalam terhadap latar belakang sosial dan ekonomi kandidat. Ikatan etnis dan kesamaan primordial, seperti derajat, martabat, bahasa, adat-istiadat, serta kepercayaan, menjadi faktor utama yang memperkuat loyalitas politik mereka. Dalam konteks pemilihan gubernur Banten, banyak pemilih di pedesaan menentukan pilihannya berdasarkan wilayah, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia kandidat.

Hal ini tercermin dari pernyataan Adam (23 tahun), seorang warga Pandeglang, yang mengungkapkan bagaimana pemilih di lingkungannya cenderung memilih kandidat yang latar belakangnya sudah dikenal oleh masyarakat:

"Iya, soalnya udah tau lah latar belakang ekonominya gimana. Jadi, kayak masyarakat juga sebenarnya tau dari mulut ke mulut. Mending milih yang udah tau asalnya gimana."

Pernyataan ini menggambarkan bahwa pemilih di pedesaan lebih percaya pada kandidat yang berasal dari lingkungan mereka sendiri atau yang memiliki kesamaan kondisi sosial-ekonomi. Struktur sosial yang kuat dalam komunitas pedesaan menciptakan pola perilaku politik yang didasarkan pada rasa kedekatan dan keterikatan dengan calon pemimpin.

Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang cenderung memilih berdasarkan kedekatan sosial dan ekonomi dengan pasangan calon, pemilih di perkotaan menunjukkan pola perilaku yang lebih individualistik. Faktor primordial seperti latar belakang etnis, adat-istiadat, atau status sosial tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Sebaliknya, tingkat keterikatan terhadap kandidat lebih rendah, dan banyak pemilih yang justru bersikap apatis terhadap pemilihan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ikhsan (25 tahun), seorang warga Kota Tangerang Selatan, yang menyoroti bagaimana sikap masyarakat perkotaan terhadap pemilihan gubernur:

"Ga sih, soalnya emang di kota kalo ga tau malah golput, kan banyak juga yang golput. Jadi yaudah, emang ga mentingin hal kaya gitu juga."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa di lingkungan perkotaan, pemilih yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pasangan calon cenderung bersikap pasif atau bahkan

memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Rendahnya interaksi sosial antarwarga dan sifat masyarakat yang lebih heterogen membuat identitas sosial atau latar belakang kandidat tidak menjadi faktor penentu utama dalam perilaku memilih. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur sosial yang lebih cair di perkotaan berpengaruh pada keputusan politik yang lebih pragmatis atau bahkan apatis.

Pendekatan struktural dalam perilaku pemilih menunjukkan perbedaan signifikan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, keterikatan sosial, ekonomi, dan budaya menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari lingkungan yang sama atau memiliki latar belakang yang mereka kenal baik. Seperti yang diungkapkan oleh Adam (23 tahun), masyarakat pedesaan lebih mempercayai calon yang latar belakangnya telah diketahui secara turun-temurun melalui interaksi sosial yang erat.

Sebaliknya, di perkotaan, struktur sosial yang lebih cair dan heterogen mengakibatkan ikatan sosial dengan kandidat menjadi kurang relevan. Pemilih di kota cenderung lebih individualis dan bahkan menunjukkan kecenderungan apatis terhadap pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Ikhsan (25 tahun). Banyak pemilih yang tidak mengenal

kandidat secara langsung, sehingga preferensi politik lebih dipengaruhi oleh faktor lain atau bahkan berujung pada keputusan untuk golput.

Terlihat bahwa struktur sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Pemilih di pedesaan lebih dipengaruhi oleh jaringan sosial dan ikatan emosional terhadap kandidat, sementara pemilih di perkotaan lebih pragmatis atau bahkan apatis karena kurangnya keterlibatan langsung dengan calon yang bertarung dalam pemilihan gubernur.

2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis melihat bagaimana faktor sosial, seperti kesamaan daerah, latar belakang jabatan, atau afiliasi politik, memengaruhi perilaku pemilih. Namun, dalam konteks pemilihan gubernur di Banten, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor ini tidak lagi menjadi penentu utama dalam menentukan pilihan politik. Di pedesaan, Adam (23 tahun) mengungkapkan bahwa kesamaan daerah atau jabatan tidak serta-merta menentukan kemenangan seorang calon. Ia mencontohkan bagaimana di Cilegon, meskipun sebelumnya dikuasai oleh partai tertentu, hasil pemilihan tidak selalu sejalan dengan ekspektasi berbasis kesamaan daerah atau partai.

"Intinya gak ngaruh lah... harusnya kan yang menang Andra Soni, tapi malah kalah di situ. Jadi walau

buat masalah kesamaan kayak kedaerahan, jabatan gitu-gitu kayaknya gak ngaruh juga sih, karena jaman sekarang kan butuhnya branding di media sosial juga," ujarnya.

Menyoroti bagaimana strategi kampanye digital lebih berperan dalam membentuk opini pemilih. Sementara itu, di perkotaan, Ikhsan (25 tahun) menegaskan bahwa masyarakat lebih melihat kepada figur yang memiliki daya tarik nasional.

"Kalau dari preferensi orang-orang dari pendekatan ini kurang mungkin ya. Masyarakat nggak melihat ke sana, tapi melihat kepada sistem penokohnya tadi," katanya.

Ia menekankan bahwa sosok yang didukung oleh figur nasional, seperti Prabowo, lebih mudah diterima oleh pemilih dibanding sekadar mempertimbangkan kesamaan daerah atau afiliasi politik lokal.

Dari kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis yang dulu menekankan kesamaan daerah dan latar belakang sosial sebagai faktor utama kini mulai tergeser oleh pengaruh media dan figur nasional. Pemilih di pedesaan lebih terpapar oleh strategi branding yang kuat, sementara pemilih di perkotaan cenderung mempertimbangkan ketokohan kandidat dan keterkaitannya dengan figur politik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan, semakin dipengaruhi oleh

dinamika politik modern yang lebih kompleks.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis dalam perilaku pemilih menyoroti bagaimana lingkungan geografis, sosial, dan ekonomi memengaruhi preferensi politik masyarakat. Dalam konteks pemilihan gubernur di Banten, wawancara dengan masyarakat pedesaan dan perkotaan menunjukkan adanya pola yang berbeda dalam pengaruh lingkungan terhadap keputusan politik mereka. Di pedesaan, Adam (23 tahun) mengakui bahwa dalam teori, faktor ekologis seharusnya berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Ia mencantohkan bagaimana keterikatan daerah memengaruhi pola pemilihan di Pandeglang dan Lebak.

"Kalo dalam teori sih harusnya mempengaruhi ya, harusnya ya. Cuma kalo masalah seteri kasus yang sekarang nih yang Dimyati ini, sepertinya mempengaruhi juga deh," katanya.

Adam menjelaskan bahwa masyarakat Pandeglang lebih memilih Dimyati dibanding kandidat lain, karena faktor kedekatan dan rekam jejaknya yang sudah dikenal luas oleh warga setempat.

"Jadi orang-orang Pandeglang tuh kan taunya emang Dimyati sama Airin sebenarnya kan. Tapi mereka lebih milik Dimyati sebenarnya. Karena ya itu tadi, dia udah dikenal sama orang Pandeglang," tambahnya.

Sementara itu, di perkotaan, Ikhsan (25 tahun) menyoroti bahwa lingkungan kota menciptakan dinamika politik yang berbeda, dengan tingkat partisipasi yang cenderung lebih rendah. "Ngaruh sih pasti, Kota Tangerang aja golput sampe 55%," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kondisi ekologis perkotaan, seperti tingkat heterogenitas penduduk dan kesibukan masyarakat, berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik.

Dari kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologis berperan dalam membentuk perilaku pemilih, tetapi dengan pola yang berbeda. Di pedesaan, faktor lingkungan cenderung memperkuat keterikatan terhadap kandidat lokal yang telah lama dikenal masyarakat. Sebaliknya, di perkotaan, kondisi ekologis justru berkontribusi pada meningkatnya angka golput, menunjukkan bahwa faktor geografis dan sosial tidak selalu mendorong partisipasi politik secara aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi kampanye perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik lingkungan masing-masing wilayah untuk mencapai efektivitas yang maksimal.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dalam perilaku pemilih berfokus pada aspek emosional, persepsi individu, serta keterikatan pemilih terhadap kandidat atau partai politik. Faktor seperti citra, identitas partai, dan strategi komunikasi

politik memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan pemilih. Di pedesaan, Adam (23 tahun) menegaskan bahwa identitas politik seorang kandidat tidak terlalu menjadi perhatian utama bagi masyarakat.

"Kalo di pedesaan, kalo itu mah gak terlalu peduli sebenarnya mereka tuh. Kita gak terlalu nge-highlight. Anderson ini dulunya sebagai anggota Gerindra doang, eh sebagai magang kan Gerindra doang, terus naik jadi anggota, naik jadi ketua gitu. Nah itu kita gak terlalu di-highlight, walaupun emang beberapa kali kita spil, tapi menurut kami itu gak terlalu penting juga buat orang tau," ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan lebih cenderung memilih berdasarkan faktor lain, seperti keterikatan sosial dan kedekatan personal, dibandingkan dengan rekam jejak politik kandidat. Sebaliknya, di perkotaan, psikologi pemilih lebih dipengaruhi oleh faktor citra dan branding politik. Ikhsan (25 tahun) menyoroti pentingnya strategi kampanye yang terarah serta program yang jelas.

"Ngaruh sih, tapi harus jelas kaya tim kampanye terarah, programnya jelas, apa, mau gimana, itu yang jadi salah satu terarah. Di kota juga ter-branding, hal tersebut branding itu jadi salah satu upaya yang lumayan bagus," ungkapnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih perkotaan lebih rasional dan mempertimbangkan aspek komunikasi

politik, termasuk bagaimana kandidat membangun citra dan memasarkan programnya melalui berbagai media.

Perbandingan ini memperlihatkan perbedaan signifikan antara pemilih di pedesaan dan perkotaan dalam pendekatan psikologis. Masyarakat pedesaan cenderung kurang memperhatikan rekam jejak politik dan lebih mengutamakan faktor sosial-kultural dalam memilih pemimpin.

Sementara itu, pemilih di perkotaan lebih dipengaruhi oleh strategi branding dan kejelasan program kerja kandidat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi kampanye harus disesuaikan dengan karakteristik psikologis pemilih di masing-masing wilayah untuk mendapatkan dukungan yang maksimal.

5. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional dalam perilaku pemilih menekankan pada pertimbangan logis dan kalkulatif dalam memilih seorang kandidat. Pemilih dalam pendekatan ini cenderung mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, serta program kerja calon sebelum menentukan pilihan mereka.

Namun, penerapan pendekatan ini bisa berbeda antara masyarakat di pedesaan dan di perkotaan. Di pedesaan, pemilih cenderung melihat rekam jejak sebagai faktor yang membangun kedekatan emosional dengan calon, terutama jika kandidat berasal dari latar belakang yang sederhana. Adam (23 tahun) menyatakan,

"Kalo rekam jejak ya itu sebenarnya poin plus juga. Jadi itu salah satu poin pendukung. Kayak masyarakat nih ngeliat Andersoni, oh dia sebelumnya pernah jadi anak petani, dia kayak jadi TKI. Kasian banget ya gitu. Terus kita pilih dia gitu. Jadi itu kayak masyarakat Pandeglang tuh mikirnya dia tuh mulanya dari nol banget gitu kan."

Hal ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat pedesaan, rekam jejak bukan hanya sekadar pengalaman kerja atau pendidikan kandidat, tetapi juga narasi perjuangan hidup yang dapat membangun simpati dan rasa keterwakilan. Sementara itu, di perkotaan, pemilih lebih kritis terhadap rekam jejak kandidat, tetapi popularitas tetap menjadi faktor dominan. Ikhsan (25 tahun) mengungkapkan,

"Masyarakat kota lebih aware tentang rekam jejak segala macam, tapi itu tidak menghilangkan elektabilitas yang dibangun secara popularitas. Orang lebih banyak berbicara tentang negatifnya, orang lebih tahu tentang sosoknya. Akhirnya kebangunlah popularitas itu. Tapi yang dilihat adalah rekam jejak itu tidak sepenting itu ya kalau di perkotaan juga. Karena hanya beberapa persen doang."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemilih perkotaan tetap mempertimbangkan rekam jejak, tetapi aspek popularitas dan citra yang terbentuk di media memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan pilihan mereka. Perbandingan ini

menunjukkan bahwa pendekatan rasional diterapkan secara berbeda di pedesaan dan perkotaan.

Di pedesaan, rekam jejak kandidat lebih bernilai secara emosional dan dilihat sebagai bukti perjuangan hidup yang relevan dengan kondisi masyarakat. Sebaliknya, di perkotaan, pemilih lebih kritis terhadap rekam jejak, tetapi mereka juga dipengaruhi oleh arus opini publik dan popularitas kandidat.

Hal ini menegaskan bahwa strategi komunikasi politik perlu disesuaikan dengan karakteristik rasionalitas pemilih di masing-masing wilayah agar lebih efektif dalam membangun elektabilitas kandidat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis lima pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis, dan rasional dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang secara mutlak menentukan pilihan pemilih dalam pemilihan gubernur. Namun, ada beberapa kecenderungan yang menunjukkan faktor dominan di antara pemilih pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, pendekatan struktural dan ekologis tampak lebih berpengaruh. Kedekatan sosial, latar belakang ekonomi, serta hubungan kedaerahan menjadi faktor utama yang mendorong pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Pemilih cenderung memilih kandidat yang mereka kenal secara personal atau berasal dari lingkungan

yang sama, seperti yang terlihat dalam keterikatan etnis dan persepsi bahwa calon yang berasal dari daerah mereka akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara itu, di perkotaan, pendekatan psikologis dan sosiologis lebih dominan. Pemilih perkotaan lebih mempertimbangkan branding politik, strategi komunikasi, dan bagaimana figur calon dibangun di media sosial serta ruang publik. Ketokohan dan dukungan dari tokoh politik nasional juga menjadi faktor signifikan yang membentuk persepsi dan pilihan mereka. Popularitas dan elektabilitas yang dikonstruksi melalui media memiliki dampak yang besar dalam menentukan pilihan pemilih perkotaan.

Pendekatan rasional, meskipun dianggap sebagai faktor ideal dalam pemilihan, ternyata memiliki pengaruh yang berbeda di kedua wilayah. Di pedesaan, rekam jejak kandidat lebih dihargai ketika dikaitkan dengan narasi perjuangan hidup dan kedekatan emosional, sedangkan di perkotaan, rekam jejak lebih bersifat pelengkap dan tidak menjadi faktor utama dibandingkan dengan citra serta popularitas kandidat. Dengan demikian, faktor paling berpengaruh dalam pemilihan gubernur dapat disimpulkan sebagai kombinasi dari pendekatan ekologis dan struktural di pedesaan, serta pendekatan psikologis dan sosiologis di perkotaan.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi kampanye politik yang efektif

harus menyesuaikan dengan karakteristik pemilih di setiap wilayah, dengan pendekatan berbasis kedekatan sosial di pedesaan dan strategi branding yang kuat di perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2017). Democracy for Sale. In *Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
<https://doi.org/doi:10.7591/978101732997>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Hafidzul, M., & Sunarso. (2024). Pengaruh Keluarga , Sekolah , dan Media Sosial Terhadap Kesadaran Politik Pemilih Pemula dari Kalangan Pelajar SMA Negeri di Kabupaten Klaten. *AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13(03), 337–349.
<https://journal.student.uny.ac.id/agora/article/view/22400/19046>
- Iqbal, M. (n.d.). ... indeks kepuasan masyarakat terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dalam pemberdayaan masyarakat. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42522>
- Naibaho, V. M. O., Nadeak, N. E., Natasiya, B., & Ivanna, J. (2024). Budaya Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak. *KYBERNOLOGY: Journal of Goverment Studies*, 4(1), 81–96.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernoLOGY>
- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 25.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v4i2.148>
- Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 88–96.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896>
- Sholikhah, A. (2016). Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Masyarakat Deesa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). *Komunika*, 8(1), 79–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.750>
- Sumendap, S. I. B., Pati, A. B., & Lambey, T. (2022). Perilaku Politik Masyarakat Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index>.

- php/jurnaleksekutif/article/view/4
1773
- Suprianto, E., & Rozi, A. (2024). Dinamika Politik Pilgub Banten 2024 : Implikasi Dan Tantangannya. *KALODRAN: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 10–20.
<https://www.jurnal.desantapublisher.com/index.php/kalodran>
- Vivi friskilia, M. Zainuddin Lutfi Fauzi, Edward Melio Bertho, & Yonatan Ari Santoso. (2024). Rasionalitas Pemilih Pemula di Kota Palangka Raya dalam Mengikuti Proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 13(2), 500–510.
<https://doi.org/10.37304/jispar.v13i2.14700>
- Yulianti, Sukarelawati, & Ruhimat. (2024). Pesan Lagu “PAN PAN PAN” Partai Amanat Nasional di Media Sosial Tiktok untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2945–2960.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12395>